

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan dengan penganggaran berbasis kinerja mulai diterapkan pada lingkungan pemerintahan, pengelolaan keuangan kemudian dipengaruhi oleh sistem anggaran yang digunakan. Indonesia menggunakan *framework* penganggaran berbasis kinerja yang mana pengertiannya yaitu suatu *framework* penganggaran yang menekankan pada pendayagunaan dana yang tersedia untuk mencapai hasil yang ideal dari pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, anggaran berbasis kinerja merupakan anggaran yang menekankan pada prestasi kerja atau hasil. Dalam buku *Sistem Akuntansi Sektor Publik. Edisi 2* (Bastian, 2006) menyatakan dalam penjelasannya mengenai Penganggaran Berbasis Kinerja, bahwa Anggaran berbasis kinerja yaitu berupa sistematisa penganggaran yang memiliki minset orientasi terhadap keluaran/*output* suatu organisasi yang memiliki keterkaitan kuat dengan visi dan misi serta strategi atau rencana jangka pendek/panjang organisasi, selain itu juga terdapat pendapat dari Sulistio yang memberikan pengertian singkat bahwa sistem penganggaran yang berbasis kinerja pada akhirnya mengkaitkan secara langsung antara *output* dengan *outcome* yang ingin dicapai organisasi yang disertai dengan intensifikasi terhadap efektifitas dan efisiensi anggaran yang diberikan kepada suatu satker (Sulistio E. B., 2010).

Penganggaran berbasis kinerja sekarang ini kerap digunakan dalam lingkup kementerian/Lembaga, hal ini disebabkan oleh metode anggaran berbasis kinerja memiliki tujuan supaya taraf hidup masyarakat dapat diperbaiki, kemudian setelah

itu akan berfungsi untuk meningkatkan efektifitas pembangunan dan memperbaiki tata kelola keuangan dan pemerintahan yang lebih baik.

Semua negara ingin memiliki kinerja pengelolaan keuangan yang baik demi tercapainya akuntabilitas pengelolaan kekayaan negara, apalagi dalam penggunaan anggaran negara, dana yang akan digunakan untuk alokasi harus sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja yang terdapat pada satuan kerja pada kementerian/lembaga, sesuai dengan pernyataan yang terdapat pada fungsi satuan kerja (satker) adalah sebagai instansi pada kementerian atau lembaga yang menjalankan suatu *Program* yang didalamnya berisi kegiatan-kegiatan dan memiliki kewenangan penggunaan anggaran (Kemenkeu, 2018).

Kewenangan yang dimiliki pemerintah untuk mengukur suatu kualitas pada kinerja pelaksanaan anggaran dilakukan oleh kementerian keuangan dengan cara membuat Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran atau IKPA, apakah itu?, pada peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 dijelaskan yakni IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) adalah sebuah system berupa indikator yang disahkan oleh Kementerian Keuangan Sebagai Bendahara Umum Negara yang berfungsi untuk mengindikasikan hasil dari kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi (PMK Nomor 195/PMK.05/2018), Lebih lanjut penjelasan mengenai kegunaan IKPA juga terdapat di Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran PER-4 /PB/2021 dimana dipaparkan Indikator

kinerja akan difokuskan pada pengukuran aspek kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a.) Revisi DIPA; b.) Deviasi Halaman III DIPA; dan c.) Pagu Minus, itu berarti IKPA akan digunakan pada satker untuk mengukur kesesuaian pada 3 Dokumen perencanaan tersebut.

Pengertian Indikator Kinerja penulis telah sebagai sebagai tolok ukur yang digunakan untuk menentukan derajat kemakmuran organisasi untuk menggapai visi misi, hal ini sesuai juga dengan pendapat Mariana Kristiyanti yang berpendapat bahwa hal yang perlu digunakan untuk menilai suatu kinerja adalah dengan indikator karena suatu kinerja dalam kalimatnya menjelaskan kepada kita secara empiris tentang suatu keadaan yang dapat dideskripsikan secara tersirat maupun tersurat, maka indikator pada suatu kinerja akan berfungsi sebagai alat yang dapat memberikan gambaran atau penilaian mengenai kondisi tersebut dari situ kita dari mana garis besar Indikator kinerja yang digunakan merupakan alat yang digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu kondisi. Apabila sesuatu kinerja dikategorikan kinerja yang bagus, lalu apa yang digunakan untuk menjelaskan mengenai hal yang disebut kinerja yang bagus?, apabila kita ingin mengukur tingkat kepahaman seseorang, apa yang digunakan untuk menjelaskan mengenai tingkat pemahaman orang tersebut? maka dari itu peran indikator suatu kinerja yang dilakukan pada Kementerian/Lembaga akan berperan penting untuk memberi informasi kepada pimpinan atau atasan lembaga, dengan demikian, tanpa adanya indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai tingkat keberhasilan

dan ketidakberhasilan suatu program atau kinerja yang dilakukan oleh Satuan Kerja (Kristiyanti, 2012).

Satuan Kerja pada Lingkungan K/L melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran melalui pengukuran kualitas kinerja menggunakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), Pengertian IKPA merupakan suatu indikator untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan kegiatan, efisiensi pelaksanaan kegiatan, dan kepatuhan terhadap peraturan (Widiatmoko, 2019), dari penjelasan diatas, lebih lanjut dalam penjelasan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Belanja menimbang Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Menteri Keuangan Sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) mengukur kualitas kinerja belanja dengan menggunakan indikator kinerja pelaksanaan anggaran.

Berdasarkan penjelasan yang tertera diatas, penulis akan melakukan analisis mengenai penyusunan IKPA pada KPP Pratama Temanggung yang terletak di Jl. Dewi Sartika No.7, Cublikan, Kowangan, Kec. Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, karena menurut penulis berdasar dari pengertian IKPA diatas, Indikator Kinerja sangat penting untuk menandai hasil progress suatu satker dari waktu ke waktu, maka dari itu maka penulis juga ingin mengetahui lebih jauh manfaat dari komponen dari penyusunan IKPA supaya dapat memenuhi fungsi pembuatan IKPA, penulis juga mengutip pendapat dari (Kristiyanti, 2012) yang memberikan pengertian bahwa Indikator kinerja suatu

organisasi haruslah dipahami secara menyeluruh mulai dari staff, pejabat instansi pemerintah (*public servants*), selain itu juga penting bagi pihak lain seperti investor, kreditur, pejabat legislatif pakar-pakar dan juga masyarakat awam dengan begitu, dengan adanya indikator yang jelas maka akan menciptakan konsensus berbagai pihak baik internal maupun eksternal untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan program dan dalam menilai keberhasilan suatu organisasi.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penulisan KTTA ini adalah meliputi sebagai berikut :

1. Apa saja komponen Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada DIPAKPP Pratama Temanggung pada tahun 2020 dan 2021
2. Bagaimana cara penghitungan nilai IKPA?
3. Bagaimana Perubahan IKPA dari tahun ke tahun?
4. Apa manfaat IKPA bagi KPP Pratama Temanggung?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan KTTA ini adalah :

1. Mengetahui apa saja komponen Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2020-2021
2. Mempelajari cara penghitungan nilai IKPA pada KPP Pratama Temanggung
3. Mengetahui manfaat Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran bagi KPP Pratama Temanggung

4. Mengetahui opini pegawai instansi terkait yang menerapkan IKPA dalam melaksanakan fungsi penganggaran berbasis kinerja

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup pada penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini akan penulis batasi cakupan pembahasannya sehingga dalam pembahasannya tidak akan membahas lebih jauh kecuali tentang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan teori ahli yang terkait dengan topik bahasan tersebut, selain itu penulis juga akan melakukan analisis pada indikator indikator yang ada dalam IKPA, kemudian mengetahui apakah ada perubahan dalam penyusunan IKPA dari tahun ke tahun, selain itu juga dilakukan wawancara untuk membahas tentang pelaksanaan dan manfaat yang dirasakan KPP Pratama Temanggung yang terletak pada alamat Jl. Dewi Sartika No.7, Cublikan, Kowangan, Kec. Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. dalam ini sebagai objek yang digunakan dalam penulisan KTTA dari implementasi IKPA , tahun anggaran nilai IKPA yang digunakan adalah periode tahun 2020 – 2021 agar data yang tersedia adalah data terkini yang menggambarkan keadaan terbaru.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat pembuatan KTTA ini pada nantinya diharapkan akan memberikan manfaat kepada segenap pihak yang mencari topik terkait,diantaranya :

1. Bagi Penulis

Diharapkan pada KTTA yang sudah selesai disusun ini,dapat menjadi Tugas Akhir yang bermanfaat bagi diri penulis pribadi dalam mempelajari salah satu komponen dalam system keuangan negara dalam

Penganggaran Berbasis Kinerja, kemudian tak lupa dalam penyusunan penulisan KTTA ini penulis juga menambah pengetahuan dan wawasan terkait system anggaran yang dilakukan pemerintah dalam mengimplementasikan ketepatan anggaran negara supaya dapat digunakan dengan efisien, serta kedepannya diharapkan penulis memiliki bekal berupa keahlian dalam menulis karya ilmiah dengan baik dan benar untuk kemudian hari

2. Bagi KPP Pratama Temanggung

Diharapkan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini dapat memberikan masukan yang positif terhadap Pelaksanaan Penganggaran Berbasis Kinerja yang telah diterapkan di KPP Pratama Temanggung, dengan implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja yang baik maka diharapkan akan mempengaruhi kualitas kinerja secara umum sehingga akan berkontribusi sebagai pemberdayaan ASN untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.